



|             |                                 |              |  |
|-------------|---------------------------------|--------------|--|
| Media Title | Bisnis Indonesia                |              |  |
| Head Line   | PU Ingin Perpres Tak Sebut Nama |              |  |
| Date        | 13 Feb 2014                     | Color        |  |
| Section     | News                            | Circulation  |  |
| Page No     | 26                              | Article Size |  |
| Journalist  | Dimas Novita                    | Advalue      |  |
| Frequency   | Daily                           | PR Value     |  |

► PEMBANGUNAN TRANS-SUMATRA

# PU Ingin Perpres Tak Sebut Nama

JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum tidak menyepakati peraturan presiden penugasan pengerjaan jalan tol trans-Sumatra menyebutkan secara spesifik nama perusahaan yang akan ditugaskan, melainkan memuat pedoman pembangunan proyek sepanjang 2.700 km tersebut.

Dimas Novita S.  
dimas.novita@bisnis.co.id

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto menjelaskan perpres itu sebaiknya menjelaskan kriteria mengenai bagaimana jalan tol tersebut dapat dilakukan dengan kekurangan-kekurangan yang ada.

"Kami tidak sepakat. Kalau kami maunya itu perpres nyebutin kriteria saja. Berapa FIRR [financial internal rate of return]. Kemudian siapa yang dapat ditunjuk yang memenuhi syarat yang sudah diatur," katanya, Rabu (12/2).

► Penugasan di setiap ruas akan diserahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum.

► Indikasi lambannya proyek akan terjadi karena butuh penyesuaian kriteria.

Seperti yang diketahui, jalan tol senilai Rp360 triliun tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, namun rendah nilai finansialnya sehingga diperlukan sebuah terobosan untuk dapat merealisasikannya.

Oleh karena itu, pemerintah akan menempuh skema penugasan terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang 100% sahamnya masih dimiliki oleh negara. PT Hutama Karya pun disebut-sebut akan menggarap megaprojek tersebut.

Namun jika hal tersebut terjadi, Djoko menilai akan menimbulkan kontra dan permasalahan yang lebih besar di kemudian hari. Selain itu, juga dapat membebani Presiden.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penugasan di masing-masing ruas tol trans-Sumatra tersebut akan diserahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum sebagai otoritas pembangunan jalan tol.

"Jadi, bisa jadi digarap Hutama Karya, bisa juga tidak. Tergantung

perusahaan mana yang sesuai dengan kriteria. Penunjukannya akan pakai permen [Peraturan Menteri PU]," paparnya.

### KOMITMEN JELAS

Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fachtur Rachman mengatakan pemerintah baik Kementerian PU, Kementerian Keuangan, dan pejabat di Istana harus memiliki komitmen yang jelas.

"Menyiapkan proyek jalan tol trans-Sumatra dengan nilai yang begitu besar tidaklah sederhana," katanya.

Lebih lanjut, dia berpendapat rencana penunjukan salah satu BUMN, seperti Hutama Karya bukanlah ide yang buruk, asalkan pemerintah memiliki pemahaman yang sama dan suara yang bulat.

Sehingga proyek yang sudah dinantikan oleh warga Sumatra tersebut cepat teralisasi tanpa ada lagi tarik ulur masalah regulasi. "Sayangnya komitmen seperti ini yang belum terlihat," ujarnya.

Jika pemerintah benar memprioritaskan proyek ini, maka pemerintah harus menempuh cara berbeda, mengingat jalan tol trans-Sumatra bukanlah seperti jalan tol lainnya yakni melalui perpres.

Menurut Fachtur, jika dalam perpres tidak disebutkan secara eksplisit satu nama berarti pengerjaan jalan bebas hambatan tersebut akan sama saja dengan



Ruas Utama Proyek Jalan Tol Trans-Sumatra

| Ruas                | Panjang (Kmu) | IRR (%) | Perkiraan Investasi (Rp Triliun) |
|---------------------|---------------|---------|----------------------------------|
| Lampung-Palembang   | 358           | 17      | 44                               |
| Palembang-Pekanbaru | 610           | 13      | 95                               |
| Pekanbaru-Medan     | 548           | 16      | 64                               |
| Medan-Banda Aceh    | 460           | 9       | 95                               |
| Palembang-Bengkulu  | 303           | 9       | 63                               |
| Pekanbaru-Padang    | 242           | 11      | 35                               |
| Medan-Sibolga       | 172           | 7       | 30                               |

Sumber: Kementerian PU

BISNIS/M. RAUSHAN

mekanisme bagi tol yang layak dibisniskan sekarang ini.

"Jika memang begitu, indikasi lambannya proyek akan terjadi karena butuh penyesuaian kriteria di masing-masing ruas."

Sebelumnya, Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan Sekretariat Kabinet telah mengembalikan draf perpres tersebut kepada Menteri Koordinator Perekonomian.

"Ada beberapa yang minta dibahas lagi jadi belum bisa diproses," katanya. (Bisnis, 12 Feb.)

Tanpa menyebutkan poin apa yang perlu dibahas, Djoko mengatakan dirinya akan mengkaji ulang beberapa hal yang dipertanyakan tersebut.

Setelah itu baru diberikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian untuk dibahas pada rapat terbatas (ratas).

"Langsung saja dirataskan

setelah selesai saya corat-coret permasalahannya," jelasnya.

Namun, Djoko belum dapat memastikan kapan dirinya merampungkan kajian ulang peraturan tersebut.

Seperti yang diketahui, pada Mei tahun lalu, pemerintah telah merevisi PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol sebagai langkah awal untuk penugasan megaprojek senilai Rp360 triliun.

Adapun dasar penugasan tersebut ialah UU No. 38/2004 tentang Jalan, UU No. 19/2003 tentang BUMN, PP No. 43/2013 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol.

Kemudian PP No. 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, dan rancangan Perpres tentang Penugasan Perusahaan Jalan Tol Trans Sumatra kepada PT Hutama Karya. ■